

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Adji, Indriyanto Seno, 2006, *Korupsi Kebijakan Aparatur Negara*, Diadit Media, Jakarta.
- _____, 2009, *Korupsi dan Penegakan Hukum*, Diadit Media, Jakarta.
- Albrecht, W. Steve, Albrecht, Chad O., Albrecht, Conan C., Zimbelman, Mark F., 2012, *Fraud Examination*, South-Western Cengage Learning, Ohio.
- Ali, Chidir, 1979, *Yurisprudensi Indonesia tentang Hukum Pidana Korupsi*, Bina Cipta, Bandung.
- Ali, Mahrus, 2011, *Hukum Pidana Korupsi di Indonesia*, UII Press, Yogyakarta.
- Anderson, Ronald A., Fox, Ivan, Twomey, David P., 1984, *Business Law*, South-Western Publishing Co., Ohio.
- Anoraga, Pandji, 1995, *BUMN Swasta dan Koperasi*, Dunia Pustaka Jaya, Jakarta.
- Atmasasmita, Romli, 1992, *Teori dan Kapita Selekt Kriminologi*, Eresco, Bandung.
- _____, 2000, *Perbandingan Hukum Pidana*, Mandar Maju, Bandung.
- _____, 2003, *Pengantar Hukum Kejahatan Bisnis*, Kencana, Bogor.
- Chazawi, Adami, 2003, *Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi di Indonesia*, Bayumedia Publishing, Malang.
- Donnell, John D., Barnes A. James, Metzger, Michael B., 1983, *Law for Business*, Richard D. Irwin, Inc., Illinois.
- Djaja, Ermansjah, *Memberantas Korupsi Bersama KPK*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Fajar, Mukti dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Penerbit Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

- Farid, Zainal Abidin, 1995, *Hukum Pidana I*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Fletcher, George P. dan Steve Sheppard, *American Law in a Global Context*, Oxford University Press, New York.
- Fuady, Munir, 2003, *Doktrin-Doktrin Modern dalam Corporate Law*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Garner, Bryan A, 2004, *Black's Law Dictionary*, Eighth Edition, West Group, St. Paul Minn.
- Hadjon, Philipus M., 2012, *Hukum Administrasi dan Tindak Pidana Korupsi*, UGM Press, Yogyakarta.
- Hall, Timothy L., 2004, *The U.S. Legal System*, Salem Press, California.
- Hamzah, Andi, 2007, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- _____, 2008, *Perbandingan Pemberantasan Korupsi di Berbagai Negara*, Sinar Grafika, Jakarta.
- _____, 2008, *Terminologi Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.
- _____, 2010, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Harahap, M. Yahya, 2009, *Hukum Perseroan Terbatas*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Harris, Freddy dan Teddy Anggoro, 2010, *Hukum Perseroan Terbatas: Kewajiban Pemberitahuan oleh Direksi*, Penerbit Ghalia Indonesia, Bogor.
- Hiariej, Eddy O.S., 2014, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta.
- Khairandy, Ridwan, 2009, *Perseroan Terbatas Doktrin, Peraturan Perundang-Undangan, dan Yurisprudensi*, Penerbit Total Media, Yogyakarta.
- Komisi Pemberantasan Korupsi, 2006, *Memahami untuk Membasmi: Buku Saku untuk Memahami Tindak Pidana Korupsi*, Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta.
- Kementerian Badan Usaha Milik Negara, 2013, *Profil BUMN Indonesia: Sinergi Membangun Negeri 2013*, Kementerian Badan Usaha Milik Negara, Jakarta.

- Latif, Abdul, 2014, *Hukum Administrasi dalam Praktik Tindak Pidana Korupsi*, Prenada Media Group, Jakarta.
- Mantone, Pamela S., 2013, *Using Analytic to Detect Possible Fraud: Tools and Techniques*, John Wiley & Sons, New Jersey.
- Marzuki, Peter Mahmud, 2005, *Penelitian Hukum*, Prenada Media Group, Jakarta.
- Minarno, Nur Basuki, 2008, *Penyalahgunaan Wewenang dan Tindak Pidana Korupsi dalam Pengelolaan Keuangan Daerah*, LaksBang Mediatama, Yogyakarta.
- Moeljatno, 2015, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Nababan, Hotasi, 2015, *Hukum Tanpa Takaran Penjara Korupsi Bagi Korban Penipuan*, Penerbit Q Communication, Jakarta Barat.
- Puslitbang Hukum dan Peradilan Badan Litbang Diklat Kumdil, 2014, *Kriminalisasi Kebijakan Pejabat Publik*, Laporan Penelitian, Mahkamah Agung RI, Jakarta.
- Simanjuntak, Cornelius dan Natalie Mulia, 2009, *Organ Perseroan Terbatas*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, 2011, *Penelitian Hukum Normatif*, RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono, 2014, *Pengantar Penelitian Hukum*, Penerbit Universitas Indonesia (UI Press), Jakarta.
- Sunggono, Bambang, 1998, *Metodologi Penelitian Hukum*, RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Supramono, Gatot, 2016, *BUMN Ditinjau dari Segi Hukum Perdata*, Jakarta, Rineka Cipta.
- Wells, Joseph T. dan Laura Hymes, 2012, *Bribery and Corruption Casebook: The View from Under the Table*, John Wiley & Sons, New Jersey.
- Widjaja, Gunawan, 2008, *Risiko Hukum Pemilik, Direksi dan Komisaris*, Jakarta, Forum Sahabat, hlm. 80.
- Wiyono, R. 2005, *Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta

B. Peraturan Perundang-Undangan dan Konvensi Internasional

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang No. 73 Tahun 1958 tentang Menyatakan Berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana untuk Seluruh Wilayah Republik Indonesia dan Mengubah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209).

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3344) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4380) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5079).

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150).

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250).

Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286).

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4297).

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5).

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Corruption, 2003* (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi, 2003) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4620).

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756).

Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5074).

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076).

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601).

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5907).

Peraturan Menteri BUMN No. PER – 01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*) pada Badan Usaha Milik Negara.

Foreign Corrupt Practices Act (Amerika Serikat).

Model Business Corporation Act (Amerika Serikat).

Securities Act of 1933 (Amerika Serikat).

United Nations Convention Against Corruption (UNCAC), 2003.

C. Yurisprudensi

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 003/PUU-IV/2006 perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 25 Juli 2006.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 77/PUU-IX/2011 perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 49 Prp 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 25 September 2012.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 42 K/Kr/1965 atas nama Terdakwa Machroes Effendi.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 81 K/Kr/1973 atas nama Terdakwa Ir. Moch Otjo Danaatmadja bin Danaatmadja.

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 1144 K/Pid/2006 atas nama Terdakwa Edward Cornelis William Neloe.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 417 K/Pid.Sus/2014 atas nama Terdakwa Hotasi D.P. Nababan.

Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 58/PID/TPK/2014/PT.DKI atas nama Terdakwa Teuku Bagus Mokhammad Noor.

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 14/Pid.Sus/TPK/2014/PN.JKT.PST atas nama Terdakwa Eddy Budiono.

Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 62/Pid.Sus/TPK/2015/PN.SBY atas nama Terdakwa Slamet Untung Irredenta.

D. Jurnal

Hadjon, Philipus M., “*Tentang Wewenang*”, Yuridika Fakultas Hukum Unair, Nomor 5 & 6, Edisi September s/d Desember.

Lestari, Sartika Nanda, “*Business Judgment Rule sebagai Immunity Doctrine bagi Direksi Badan Usaha Milik Negara di Indonesia*”, Notarius, Edisi 08 Nomor 2 September 2015.

Pramono, Nindyo, “*Tanggung Jawab dan Kewajiban Pengurus PT (Bank) Menurut UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas*”, Buletin Hukum Perbankan dan Kebanksentralan, Volume 5 Nomor 3 Desember 2007.

E. Pidato

Adji, Indriyanto Seno, *Prospek Hukum Pidana Indonesia pada Masyarakatan yang Mengalami Perubahan*, Pidato Upacara Pengukuhan sebagai Guru Besar Tetap dalam Ilmu Hukum Pidana pada Fakultas Hukum Universitas Krisnadwipayana, Jakarta 19 Februari 2004, hlm. 27.

Rajagukguk, Erman, “*Perlindungan Hukum terhadap Risiko Pengambilan Keputusan yang Diambil oleh Direktur dan Komisaris*”, Panel Diskusi Governance dan Risiko Kriminalisasi: Kasus di Industri Telekomunikasi, diselenggarakan oleh Lembaga Komisaris dan Direktur Indonesia (LKDI), Jakarta 30 April 2014.

F. Koran

Hiariej, Eddy O.S., “*Memahami Tindak Pidana Korupsi*”, Kompas, 25 Mei 2015.

Hiariej, Eddy O.S., “*Pasal Keranjang Sampah*”, Kompas, 7 Mei 2015.

G. Internet

Kementerian Komunikasi dan Informatika, “*Potret Buram Korupsi Indonesia*”, <https://kominfo.go.id/index.php/content/detail/6547/Potret-Buram-Korupsi-Indonesia/0/infografis>, diakses 25 November 2016.

- Marta, M. Fajar, BUMN, Suntikan Modal, dan Korupsi, <http://nasional.kompas.com/read/2015/02/17/15030091/BUMN.Suntikan.Modal.dan.Korupsi>, diakses 17 September 2016.
- Rajagukguk, Erman, “*Walaupun Keuangan BUMN Bukan Keuangan Negara; KPK, Kejaksaan, dan Kepolisian Tetap Berwenang Memeriksa Korupsi di BUMN*”, www.ermanhukum.com/dokumen/Keuangan%20BUMN%20bukan%20Keuangan%20Negara.pdf, diakses 25 Agustus 2016.
- Sinaga, Royke, “*Rini: Kontribusi BUMN bagi Perekonomian Makin Besar*”, <http://www.antaranews.com/berita/524734/rini-kontribusi-bumn-bagi-perekonomian-makin-besar>, diakses 17 September 2016.
- Suryowati, Estu, “*Ini Perbandingan antara BUMN RI dengan Malaysia dan Singapura*”, <http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2015/12/17/125700426/Ini.Perbandingan.antara.BUMN.RI.dengan.Malaysia.dan.Singapura>, diakses 17 September 2016.
- Thertina, Martha, “*BPK Khawatir Manipulasi BUMN Terulang*”, <https://m.tempo.co/read/news/2013/09/05/087510492/bpk-khawatir-manipulasi-bumn-terulang>, diakses 17 September 2016.
- Transparency International, “*Corruption Perceptions Index 2015*”, <http://www.transparency.org/cpi2015>, diakses 25 November 2016